

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Abdurrahman M, *Praktik Hukum Notaris/PPAT dan Akta Otentik*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2005.
- Aslan Noer, *Pelurusan kedudukan Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Anshori, H. A, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- A.P Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Bagian I*, (Bandung, 1989).
- A.W Widjaja, *Etika Administrasi Negara, Cet.ke-2*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1999)
- Azizah, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Intimedia : Malang.
- Barda Nawawi Arief , 2002, *Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017).
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono, “Tugas dan Kedudukan PPAT,” *Hukum dan Pembangunan*, (Juni 2017).
- Charlie Rudyat, 2022, *Kamus Hukum*, Yudistira, Jakarta.

- Cholid Narbuko dan Abu rachmadi, 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- C.S.T. Kansil, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi* Jakarta:Prenada Media.
- Daeng Naja, 2021, *Teknik Pembuatan Akta Cet.4* Pustaka yustisia, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Darwan Prinst, *Strategi menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
- Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum Volume 20 nomor 1, 2008
- Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2022, *Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik: Studi Tentang Pemalsuan Identitas Diri Penghadap, Literasi Nusantara*, Malang.
- G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999)
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet.ke-2*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009).
- Hans Kelsen (a) , 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2019, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung.
- Harahap Yahya, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Herlien Budiono. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan – Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- H.R.Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola,2003).
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta

J.Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, cet. 2, (Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2014).

Jimly Asshddiqie, M.Ali Safaat, Et. Al. 2006. *Teori Hans Kelsen Tetang Hukum*. Jakarta : Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri. Jakarta.

John Salihendo, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* , Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015.

Komariah, 2019, *Edisi revisi Hukum Perdata , cetakan ke-6*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Liliana Tedjasaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2006.

Maritman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986, LN No.77)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).

Mulyono, M, *Hukum Notaris & PPAT di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada media Group, Jakarta

Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Pudjiyono T, *Implikasi Hukum Pemalsuan Akta Notaris & PPAT: Perspektif Pidana dan Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 2017, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni.

Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993).
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta, 2006.
- Rusdianto Sesung, Dan Fayakundia Putra Sufi, Et Al. 2017. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. R.A. De. Rozarie. Surabaya.
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015,
- Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Kencana.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju : Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekidjo Notoatmojo, 2018, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan* (suatu Kajian Mengenai UUHT), (Bandung: Alumni, 1999).
- Sutedi, A, *Hukum Notaris & PPAT di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suteki, *Hukum Perdata Indonesia: Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syahrizal, S, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekidjo Notoatmojo, 2018, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- S.R Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.

Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Eresco.

Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Lembaga Fatimah Azzahra, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Agus Siswanto, "Perlindungan Hukum Terkait Perbedaan Luas Faktual Dalam Pengukuran Oleh Petugas Ukur Terhadap Luas Yang Tercantum Di Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta," *Jurnal Dinamika Hukum* 10.2, 2020,

Anand, G., Putri, D. S., Nugraha, X., Hartono, J., & Pusparani, M. A, *Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian yang Dibuat Sebelum Penahanan untuk Pembeli Tanah dengan Itikad Baik*, 2022, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law).

Aris Yulia, Profesi Notaris di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila, *Jurnal Law and Justice*, Volume 4 Nomor 1, April 2019.

Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, 3, no. 1 (2015).

Dhea Tri Febrina, Ahars Sulaiman, 2019, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT (Studi kasus PPAT & PPAT Anita Mahdalena, SH) PETITA, Vol. 1 No. 1.

Doddy Noormansyah, Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Litigasi*, Volume 7 Tahun 2006.

- Eko Utomo Nugroho, Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata, *ejurnal.bunghatta.ac.id*, 2015
- Elfi Rochmah, Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab, *Jurnal Volume 3*, Nomor 1, Juli 2016 ISSN 2406-775X
- Gusti Bagus Yoga Prawira, 2016, Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah, *Jurnal IUS*, Vol IV. No 1.
- Habieb Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Handojo Djoko Waloejo Ana Silviana, Khairul Anami, “Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) Dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Tanah,” *Law, Development & Justice Review* 3 (2020).
- Hariawan, K., & Adjie, H, *Kedudukan Hukum Notaris Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata*, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 269.
- Heriyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik, *Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 2*, Mei – Agustus 2016.
- Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang^[1] Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2, Nomor 1, April 2017.
- Marlionsa, A A Ngr Tian, 2018, *Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Tuntutan Ganti Rugi Mengenai Hak Cipta Logo Dari Pencipta*, *Jurnal Kertha Semaya* 6, No 3.
- M Holidi, 2023, *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata*, Yogyakarta, Volume 4 nomor 2.
- Mohamat Riza Kuswanto, Urgensi Penyimpapan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Volume IV Nomor 1, Juli – Desember 2017.
- Mufasirin, A., & Witasari, *Implikasi Hukum atas Pembatalan Notaris yang Dapat Dibatalkan oleh Hukum*, 2022, *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(4), 1472-1480.
- Muhammad Fabryan Nur, Yeni Widowaty, dan Trisno Rahardjo, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris”, *Media of Law and Sharia*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2019.

Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Praktik Pendirian Perseroan Terbatas, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2019.

Philipus M.Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, *Jurnal Pro Justisia* , Yuridika.

Purnayasa, A. T, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, 2018, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 395-409.

Retno Kus Setyowati, “Pembatalan Transaksi Hak Atas Tanah Oleh Penjual Dengan Alasan Belum Lunas,” *Binamulia Hukum*, Vol 9 No 1 Juli 2020.

Sa'it, A, *Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik. Jurnal Pendidikan dan Pengembangan*, 2021, 9(4), 773-776.

Seroja, T. D., Nurlaily, N., Shahrullah, R. S., Hadiyati, N., & Altison, K, *Meneliti Tanggung Jawab Notaris dalam Hukum Perdata*, 2021, *Wacana Hukum*, 27(1), 74-83.

Sugiyono, M. R, *Kekuatan Perjanjian Di Bawah Tangan Terhadap Akta Jual Beli Secara Notariil Terhadap Jual Beli Tanah*, 2022, *Jurnal Akta Notaris*, 1(1).

Susanto, Sri Nur Hari, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”, *Jurnal Adminitrasi Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019.

Yogi Priyambodo, Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3, September 2017.